



## ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP ANCAMAN KERJA PASCA INFLASI

Wirren Chang <sup>a</sup>, Agnes Doraresta Khatarina Tokan <sup>b</sup>, Dewi <sup>c</sup>, Gladys Christiani <sup>d</sup>, Mardiana Ng<sup>e</sup>, Serina <sup>f</sup>, Wisnu Yuwono<sup>g</sup>

<sup>a</sup>Manajemen, [2141018.wirren@uib.edu](mailto:2141018.wirren@uib.edu) , Universitas Internasional Batam

<sup>b</sup>Manajemen, [2141068.agnes@uib.edu](mailto:2141068.agnes@uib.edu) , Universitas Internasional Batam

<sup>c</sup>Manajemen, [2141229.dewi@uib.edu](mailto:2141229.dewi@uib.edu) , Universitas Internasional Batam

<sup>d</sup>Manajemen, [2141158.gladys@uib.edu](mailto:2141158.gladys@uib.edu) , Universitas Internasional Batam

<sup>e</sup>Manajemen, [2141167.mardiana@uib.edu](mailto:2141167.mardiana@uib.edu) , Universitas Internasional Batam

<sup>f</sup>Manajemen, [2141081.serina@uib.edu](mailto:2141081.serina@uib.edu) , Universitas Internasional Batam

<sup>g</sup>Manajemen, [wisnu@uib.ac.id](mailto:wisnu@uib.ac.id) , Universitas Internasional Batam

### Abstract

*The increase in inflation that occurs causes the threat of unemployment in Indonesia. According to the BPS, 4.48 million Indonesians are unemployed in 2022. Cyclical unemployment is unemployment caused by a large-scale economic crisis (inflation), so many companies lay off their workers to reduce the risk of loss in a company. The method used in this research is literature study. The literature study method is a method that is carried out by collecting data and documents from references that are in accordance with the author's research. In this study, the authors analyze monetary policy as a government policy that can be used in overcoming the threat of post-inflation unemployment. Monetary policy is one way to reduce unemployment by increasing the money supply and reducing interest rates which will increase investment. The increasing amount of investment will increase job opportunities which in turn will reduce unemployment*

**Keywords:** *unemployment, PHK, literature study, monetary policy.*

### Abstrak

Peningkatan inflasi yang terjadi menyebabkan ancaman pengangguran di Indonesia. Tercatat pada BPS sebanyak 4,48 juta penduduk Indonesia mengalami pengangguran tahun 2022. Pengangguran siklis merupakan pengangguran yang diakibatkan oleh krisis ekonomi yang terjadi dalam skala besar (inflasi), sehingga banyak perusahaan melakukan PHK pada tenaga kerja mereka untuk mengurangi resiko kerugian di dalam suatu perusahaan tersebut. Metode yang dipakai di penelitian ini adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan dokumen dari referensi yang sesuai dengan penelitian penulis. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa kebijakan moneter sebagai kebijakan pemerintah yang bisa digunakan dalam mengatasi ancaman pengangguran pasca inflasi. Kebijakan moneter adalah salah satu cara untuk mengurangi pengangguran dengan cara memperbanyak penawaran uang dan mengurangi suku bunga yang akan meningkatkan investasi. Jumlah investasi yang semakin meningkat akan menambah kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran.

**Kata kunci:** pengangguran, PHK, studi literatur, kebijakan moneter

### PENDAHULUAN

Menurut Badan Pusat Statistik, sebanyak 4,48 juta orang penduduk yang ada di Indonesia mengalami pengangguran pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan peningkatan angka inflasi yang terjadi diakibatkan penurunan pada produk domestik bruto. Dampak dari pengangguran tersebut cenderung menaikkan potensi kriminalitas, dan kemiskinan yang dapat menyebabkan proses kinerja ekonomi menurun dimasa yang akan datang. Jika tidak ditindaklanjuti maka kemungkinan besar akan mengalami kebangkrutan di negara secara permanen.

*Received Juni 30, 2022; Revised Oktober 2, 2022; Accepted Desember 22, 2022*

Penyebab dari pengangguran bisa timbul dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri sendiri seperti secara sukarela tidak bekerja, *incompetentnya* kinerja proses individu suatu karyawan yang menyebabkan perusahaan memecat karyawan tersebut untuk menghindari penghambatan kinerja perusahaan, kewajiban yang ditangguh oleh perusahaan naik disebabkan oleh tingkat suku bunga yang naik sehingga perusahaan mau tidak mau mengurangi angka karyawan mereka, kurangnya lapangan pekerja ditambah dengan tingginya angka tenaga kerja di negara tersebut, dan tingkat harapan perusahaan dalam memperkerjakan karyawan mereka juga terlalu tinggi sehingga karyawan yang masuk sedikit. Sehingga memunculkan jenis-jenis pengangguran seperti pengangguran *deflasiomer*, *voluntary*, siklis, dan juga friksional (Franita, 2016).

Akhir-akhir ini, terdapat jenis pengangguran yang sering diperbincangkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia yaitu pengangguran siklis yang terjadi. Pengangguran siklis merupakan pengangguran yang diakibatkan oleh krisis ekonomi yang terjadi dalam skala besar (inflasi) sehingga banyak perusahaan melakukan PHK pada tenaga kerja mereka untuk mengurangi resiko kerugian di dalam suatu perusahaan tersebut. Pengangguran siklis ini merupakan salah satu pengangguran yang paling berbahaya jika diabaikan karena disaat krisis ekonomi sedang menurun dan tingkat pengangguran meningkat maka yang akan terjadi adalah negara tersebut akan mengalami resesi (Marlini Septi, 2020).

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus lebih sensitif dan berfokus pada kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan untuk mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi supaya mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Kegunaannya agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara sehingga negara menjadi maju.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang ataupun lama. Inflasi sendiri dapat terjadi karena adanya tekanan dari sisi permintaan *demand-pull inflation* dan *cost-push inflation*. *Demand-pull inflation* disebabkan oleh naiknya permintaan yang terlalu besar dibandingkan dengan penawaran produksi. *Cost-push inflation* terjadi karena turunnya produksi yang disebabkan oleh kenaikan harga/biaya produksi (kenaikan harga bahan baku, nilai mata uang yang bersangkutan jatuh, adanya tuntutan kenaikan upah dari buruh yang kuat) (Qomaruddin, 2018). Dalam mencatat angka perubahan pada inflasi harus menggunakan angka indeks yang disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang telah terjadi dalam suatu periode dan dinyatakan dalam persentase besarnya angka inflasi periode tersebut.

Skala pengukuran inflasi terdapat 4 jenis, yaitu:

1. Jenis inflasi ringan  
Kondisi inflasi yang skala inflasinya berada dibawah 10% atau skala penilaiannya kurang dari 10% per tahun.
2. Jenis inflasi sedang  
Inflasi sedang adalah jenis inflasi yang skala pengukurannya 10-30% per tahun. Jenis inflasi ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi oleh karena itu, jenis inflasi ini harus diwaspadai.
3. Jenis inflasi berat  
Jenis inflasi ini yang dimana kegiatan ekonomi sudah mulai mengalami kelumpuhan. Skala pengukurannya adalah 30-100% per tahun.
4. Jenis inflasi sangat berat atau hiperinflasi  
Inflasi yang skala pengukurannya lebih dari 100% per tahun. hiperinflasi ini bisa terjadi akibat peredaran uang secara berlebihan sehingga nilai mata uang menjadi tidak berguna, menyebabkan perekonomian disuatu negara menurun, contohnya di negara Zimbabwe. (Juliandhita, 2019)

### 2. Pengertian pengangguran

Menurut data yang diambil dari sumber Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, dikatakan bahwa pengangguran adalah sebutan bagi penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru. Pengangguran juga merupakan penduduk atau warga yang tidak mencari pekerjaan dikarenakan sudah diterima berkerja tetapi masih belum ingin mulai bekerja. Pengangguran dapat mengakibatkan permasalahan ekonomi dan juga sosial bagi siapapun yang mengalaminya (Anggraeni, 2022). Tidak mendapatkan penghasilan menimbulkan penganggur harus mengurangi pengeluaran untuk kehidupan kebutuhan. Pengangguran terjadi tidak hanya dihadapi oleh negara berkembang tetapi juga dapat dihadapi oleh negara yang sudah maju

### 3. Pertumbuhan ekonomi

Menurut Smith, pertumbuhan ekonomi terjadi jika pembangunan terjadi, maka proses tersebut akan berlangsung secara kumulatif dan terus-menerus. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kinerja perekonomian dan menganalisis hasil pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi bisa menjadi tolak ukur dalam aktivitas perekonomian di suatu negara dalam menghasilkan pendapatan tambahan di suatu periode. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran adalah masalah utama dalam ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, masalah upah yang rendah dan angka pengangguran yang tinggi. Tenaga kerja yang semakin bertambah, jauh lebih besar dari lapangan kerja yang disediakan, hal inilah yang menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi (Soares, 2013). Selain itu, pembangunan manusia juga menjadi bagian terpenting dari pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dilihat dari segi ekonomi dan perspektif material (Ardian et al., 2022).

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis metode yang dipakai di penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan menggunakan cara mencari informasi dan referensi melalui artikel, jurnal, serta lain sebagainya. Dengan metode ini penulis tidak perlu lagi untuk melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan analisa ke dalam lingkungan lapangan, melainkan hanya cukup dengan mengumpulkan data-data yang ada dari referensi yang sesuai dengan penelitian penulis (Indayani & Hartono, 2020). Selanjutnya penulis juga menggunakan metode deskriptif dalam bentuk tabel untuk menganalisis jumlah pengangguran di Indonesia pasca inflasi dari *website* resmi BPS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengatasi pengangguran pasca kenaikan inflasi, pemerintah sudah seharusnya dengan cepat menindak lanjutkan masalah tersebut, karena jika tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan semua aspek ekonomi hingga sosial. Ada banyak faktor penyebab tingginya angka pengangguran yaitu, tingginya angka kemiskinan di dalam suatu negara yang secara langsung mengakibatkan tingginya angka kriminalitas pada masyarakat, serta menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya perhatian pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran pasca inflasi.

Ada beberapa cara pemerintah dalam mengatasi inflasi salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang dapat diterapkan. Kebijakan pemerintah terdiri dari dua macam, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Dalam hal kebijakan pemerintah tersebut, peneliti akan menganalisis kebijakan moneter dalam mengatasi ancaman pengangguran saat inflasi (Ferly, 2013). Kebijakan moneter dijalankan dengan mempengaruhi penawaran uang dan suku bunga.

### Dampak jika terjadi pengangguran

Pengangguran bisa memberikan dampak buruk untuk perekonomian negara maupun masyarakat, dampak untuk perekonomian negara salah satunya adalah pendapatan perkapita menurun. Berikut ini beberapa dampak yang dapat terjadi akibat pengangguran:

- a. Pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak bisa meminimalkan tingkat kesejahteraan yang dicapai. Akibat pengangguran *output* actual yang dicapai lebih rendah dibawah *output* potensial. Sehingga keadaan tersebut diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai akan lebih rendah dari tingkat kemakmuran yang akan dicapai.
- b. Selain itu, pengangguran juga dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan pemerintah dalam pajak. Pengangguran akan memberi dampak rendahnya tingkat kegiatan dalam ekonomi yang menjadikan pajak pemerintah yang didapatkan akan menjadi lebih sedikit. Artinya, jika semakin tinggi tingkat pengangguran, akan berakibat pada berkurangnya kemampuan pemerintah dalam menjalankan beberapa kegiatan dalam hal pembangunan.
- c. Selanjutnya, pengangguran akan berdampak pada menghambatnya penggalakan pertumbuhan ekonomi. Keadaan tersebut akan terlihat jelas bahwa pengangguran tidak dapat mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan investasi pada masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan dampak dari pengangguran diatas, dapat disimpulkan bahwa pengangguran dapat berdampak tidak akan mampu menggalakkan dalam pertumbuhan ekonomi baik untuk jangka waktu yang panjang maupun untuk jangka waktu yang pendek.

1. Kebijakan moneter untuk mengatasi pengangguran

Kebijakan moneter ekspansif adalah salah satu cara untuk mengurangi pengangguran dengan cara memperbanyak penawaran uang dan mengurangi suku bunga. Jika terjadi makin meningkatnya penawaran uang akan menyebabkan menurunnya suku bunga serta akan meningkatkan investasi. Oleh karena itu, jumlah dalam investasi semakin meningkat yang akan menimbulkan bertambahnya kesempatan dalam kerja dan berdampak dengan berkurangnya pengangguran. Pada dasarnya kebijakan ini memang dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) ketika perekonomian sedang mengalami resesi (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020). Contoh dari kebijakan moneter ekspansif ini adalah bank Indonesia menambah jumlah yang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak yang nantinya akan membuat perekonomian berjalan dengan cepat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2022 sebesar 5,85% turun sebesar 0,37% dibandingkan dengan Agustus 2021.

**Kaitan inflasi pada pengangguran**

Inflasi adalah indikator dalam moneter yang dapat berpengaruh dalam stabil atau tidaknya perekonomian suatu negara. Inflasi terjadi karena dipicu oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar AS. Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS dapat juga bisa dipicu oleh adanya penguatan Dollar AS terhadap mata uang dunia (Maulana & Maris, 2022). Apabila terjadi inflasi maka perekonomian negara akan memburuk, tingkat kesejahteraan rakyat yang menurun, dan stabilitas ekonomi yang terganggu, tidak hanya itu, inflasi yang berkepanjangan dapat menyebabkan kegiatan produsen terhambat dikarenakan harga yang naik dan daya tarik konsumen dalam membeli produk berkurang.

2. Kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi

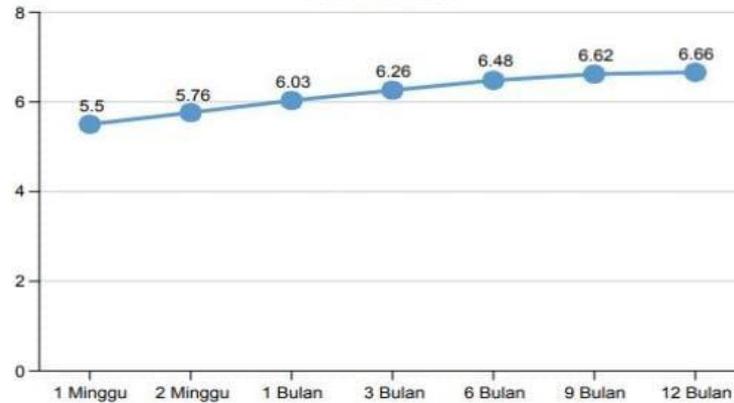
Kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi bisa dilakukan dengan cara berikut:

- Operasi pasar terbuka  
Ini adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh bank sentral dengan menjual surat-surat berharga (contohnya obligasi) dari pemerintah ke rakyat. Hasilnya jumlah uang yang tersebar atau beredar ditangan masyarakat berkurang dan obligasi pemerintah naik. Jika uang yang beredar dimasyarakat terlalu banyak bisa berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi dan bisa meningkatkan inflasi. Operasi pasar terbuka menjadi salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan oleh otoritas moneter.

Jenis Kebijakan	Jumlah Uang di Bank Indonesia	Jumlah Uang Beredar di Masyarakat	Harga Barang	Nilai Uang	Inflasi
Bank Indonesia Menjual SBI	↑	↓	↓	↑	↓

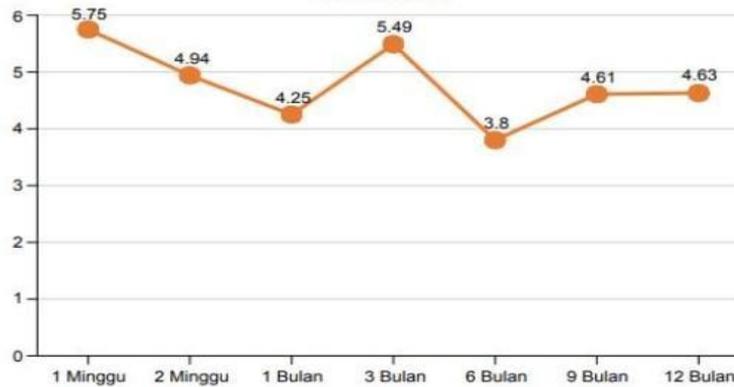
Sumber: BPMPK-KEMENDIKBUD

**Suku Bunga RRT Hasil Transaksi Instrumen OPT Kontraksi**  
Bank Indonesia



Tenor	1 Minggu	2 Minggu	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan
Instrumen OPT Kontraksi	RR SBN						
Suku Bunga RRT(%)	5.5%	5.76%	6.03%	6.26%	6.48%	6.62%	6.66%
Tanggal Transaksi Terakhir*)	28/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	23/12/2022

**Suku Bunga RRT Hasil Transaksi Instrumen OPT Ekspansi**  
Bank Indonesia



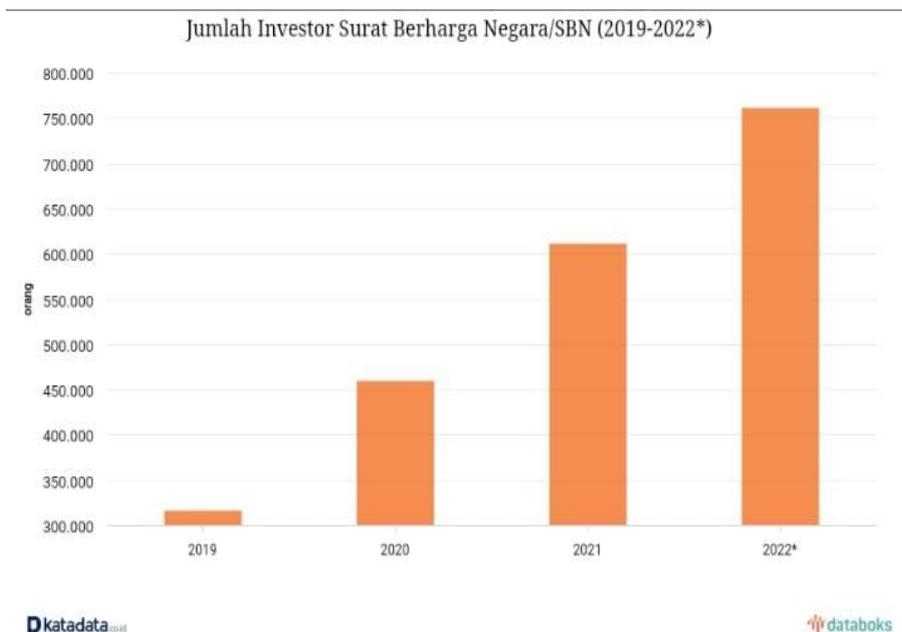
Tenor	1 Minggu	2 Minggu	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan
Instrumen OPT Ekspansi	Term Repo						
Suku Bunga RRT(%)	5.75%	4.94%	4.25%	5.49%	3.8%	4.61%	4.63%
Tanggal Transaksi Terakhir*)	28/12/2022	10/10/2022	21/09/2022	19/10/2022	15/03/2022	09/09/2022	09/09/2022

Sumber: Bank Indonesia(BI)

- Meningkatkan tingkat bunga diskonto

Dengan menaikkan tingkat bunga diskonto, Maka permintaan publik pun berkurang sehingga mengurangi pinjaman kredit dan kemudian bisa mengurangi inflasi. Tingkat bunga diskonto merupakan suatu bunga atau potongan yang wajib dibayar oleh seorang yang telah menjual surat dagang yang diuangkan sebelum pada waktunya. Tujuan dari menaikkan tingkat bunga diskonto ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk menabung. Dengan dinaikkan nya tingkat suku bunga, maka masyarakat yang mengetahui suku bunga yang tinggi akan tergesa-gesa untuk menyimpan uangnya yang sejalan dengan tujuan dari kebijakan ini.

Contoh dari kebijakan diskonto adalah perilisian Surat Berharga Negara (SBN), surat yang dirilis bisa berupa surat utang, obligasi negara, maupun Saving Bond Ritel (SBR) yang barubaru ini dilakukan oleh pemerintah. Tujuan dari dijualnya SBN adalah untuk mengatasi inflasi yang dilakukan oleh pemerintah dan ditujukan kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah akan mengumumkan jadwal pembukaan SBN kepada masyarakat dan bisa diakses diinternet.



## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Tingginya pengangguran adalah hal yang sangat tidak diinginkan bagi suatu negara, karena jika satu negara memiliki tingkat pengangguran yang sangat tinggi maka kemungkinan yang terjadi bahwa perekonomian suatu negara menjadi melambat. Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan beragam cara agar dapat mengatasi pengangguran yang salah satunya merupakan kebijakan moneter ekspansif, kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan dilakukan pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran didalam suatu negara dengan cara menurunkan suku bunga

Dengan harapan agar perusahaan didalam negara lebih suka meminjamkan uang untuk melakukan ekspansi perusahaan mereka dan dapat juga mengajikan karyawan mereka.

Kebijakan moneter ekspansif adalah salah satu cara untuk mengurangi pengangguran dengan cara memperbanyak penawaran uang dan mengurangi suku bunga. Jika terjadi makin meningkatnya penawaran uang akan menyebabkan menurunnya suku bunga serta akan meningkatkan investasi. Pengangguran bisa memberikan dampak buruk untuk perekonomian negara maupun masyarakat, dampak untuk perekonomian negara salah satunya adalah pendapatan perkapita menurun.

### Rekomendasi

1. Rekomendasi bagi pemerintah ialah, diharapkan agar meningkatkan kualitas SDM dengan cara melakukan peningkatan dalam pendidikan, serta melakukan pelatihan kepada SDM sehingga menjadi SDM yang produktif yang nantinya akan menimbulkan turunnya tingkat pengangguran dalam negeri.
2. Selanjutnya, rekomendasi bagi pemerintah agar memperluas atau menambah lapangan pekerjaan, dan juga memberikan informasi dalam hal lowongan pekerjaan secara merata di berbagai daerah, sehingga pengangguran atau angkatan yang ingin bekerja tidak kekurangan informasi mengenai lowongan pekerjaan.
3. Anjuran bagi pemerintah adalah dengan meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan diharapkan ada dorongan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka lapangan kerja yang lebih luas. Selain itu, disarankan agar pemerintah mendirikan balai latihan kerja untuk melaksanakan pelatihan tenaga kerja guna melengkapi informasi yang tersedia bagi pencari kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusmianata, N., Militina, T., & Lestari, D. (2018). Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Suku Bunga serta Pengeluaran Pemerintah terhadap Inflasi di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 19(2), 188. <https://doi.org/10.29264/jfor.v19i2.2125>
- Amalia, F. (2012). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (Kti) Periode 2001-2010. *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan*, 10(2), 158–169. <https://doi.org/10.21009/econosains.0102.02>

- Anggraeni, R. (2022). Pengentasan Angka Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015-2019. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(4), 1–12. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i4.136>
- Ardian, R., Syahputra, M., & Dermawan, D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia. *EBISMEN Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 190–198.
- Aulia, R. I. T., Hodijah, S., & Umiyati, E. (2020). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode 2001-2017. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 9(1), 26–34. <https://doi.org/10.22437/jels.v9i1.11946>
- Dewita Hia, Y. (2015). Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran. *Economica*, 1(2), 208–213. <https://doi.org/10.22202/economica.2013.v1.i2.121>
- Ferly, P. (2013). Pengangguran, Inflasi, Dan Kebijakan Pemerintah. *MakroEkonomi*, 04.
- Franita, R. (2016). Analisa Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(3), 88–93.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 201–208. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/8581>
- Juliandhita, C. (2019). Laba Bersih, Inflasi dan Return Saham. 9–25.
- Krisnandika, V. R., Aulia, D., & Jannah, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 720–729. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2227>
- Marlini Septi. (2020). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Akibat Pandemi Covid 19. *International Conference on The Teaching of English and Literature*, 1(1), 46–50.
- Maulana, A., & Maris, Y. (2022). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Dan BI Rate Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). *Worldview: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Sosial Sains*, 1(1), 1–14. <http://jurnal.uwp.ac.id/>
- Qomaruddin, Q. (2018). Pengaruh Inflasi Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic)*, 4(1), 50–66. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3351>
- Rasyidin, M., Saleh, M., Muttaqim, H., Nova, & Khairani, C. (2022). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, Vol 3, No(2716–4128), 225–231. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1761>
- Rianda, C. N. (2020). Analisis Dampak Pengangguran Berpengaruh Terhadap Individual. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12(1), 17. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.358>
- Said Firdaus,; Amelia Rahmi, R. U. (2021). *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh (JIMMA) Edisi Jan-Jun 2018 Vol. 8 No. 1. Manajemen Muhammadiyah*, 8(1), 34–48.
- Salim, J. F., Kebijakan, P., & Salim, J. F. (2017). *Ekonomi*. III(2), 68–76.
- Soares, A. P. (2013). Soares, A. P. (2013). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.
- Triwahyuni, T. (2021). Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 199–210. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.209>
- Winanto, A. . (2019). Makalah ekonomi makro inflasi dan pengangguran. 125180417, 1–25. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmy6PlzPnwAhXBF3IKHQuaATUQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fosf.io%2Fgw-nb3%2Fdownload&usg=AOvVaw1QWnSfJkApgTkuCnqZKNOF>